

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Tanggal 23 Mei 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan Kabupaten Induk yang telah melahirkan dua daerah otonom yakni Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada RPJMD Tahun 2006-2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2006.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 merupakan pelaksanaan Tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2006 – 2011 dan merupakan lanjutan RKPD Tahun 2008. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang RKP Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007; Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2007.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa mempertimbangkan terbatasnya ketersediaan sumber daya, selanjutnya ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahunan yang dijabarkan ke dalam Fokus, Program dan Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Prioritas Pembangunan Tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencapaian sasaran pembangunan harus terarah, terfokus dan terprogram. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan teridentifikasi dan tersepakati Fokus/Kegiatan Prioritas Daerah yang memerlukan dukungan kebijakan, sumberdaya dan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, sektor swasta dan masyarakat, serta terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 merupakan hasil adopsi dari Rencana Kerja SKPD Tahunan (Renja-SKPD) dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 sebagai pedoman dan arah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau usulan program/kegiatan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009 Untuk itu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2009 akan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan memberikan penekanan pada program dan kegiatan yang sesuai pada kemampuan Pembiayaan Pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pokok yaitu :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

BAB II

TEMA DAN PRIORITAS

A. KONDISI UMUM

1. PENCAPAIAN TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2009

Secara geografis Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbentang di jazirah utara Pulau Sulawesi terletak antara 0° 30'-1° 0' Lintang Utara dan 123° - 124° Bujur Timur.

- Ø Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- Ø Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Ø Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
- Ø Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tanggal 23 Mei 2007 hasil pemekaran telah melahirkan dua daerah otonom Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Masing-masing Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Bolaang Mongondow Induk. berjarak ± 200 Km dari Kota Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara atau dapat ditempuh melalui perjalanan darat Kotamobagu-Manado ± 3 jam perjalanan darat.

Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 22 Kecamatan dan 245 desa difinitif, 2 kelurahan. Dengan jumlah penduduk ± 237.472 jiwa (Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2007). Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow setelah dimekarkan mencapai 6.609.98. km² atau 43,28 % dari luas Provinsi Sulawesi Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengacuh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bolaang Mongondow Tahun 2006 – 2011, dan mewujudkan keinginan semua pihak dengan meminimalisir permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan perlu

merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang implementasinya diarahkan pada beberapa hal yaitu :

Pertama; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ditandai adanya ciri-ciri; masyarakat yang *partisipatif, demokratis, profesional* dan melaksanakan pembangunan sesuai *law and order* pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kedua; memperbaiki perekonomian baik ditingkat mikro (masyarakat) maupun ditingkat makro (nasional) memperdayakan sektor-sektor ekonomi rakyat pedesaan, menggali sumber-sumber ekonomi lokal yang memiliki potensi pasar atas inisiatif masyarakat.

Ketiga; pemantapan kelembagaan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan administrasi pemerintahan.

Keempat; pementapan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif (pembangunan partisipatif).

Atas dasar pemikiran sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dibutuhkan visi yang dapat menyatukan hati, pikiran dan gerak langkah semua pihak terutama para pemangku kepentingan untuk bersama-sama secara sinergi dan harmonis merubah kendala dan hambatan menjadi peluang.

Untuk menuju satu titik temu dari berbagai keinginan, maka perlu dirumuskan suatu platform yang membawa tindakan realistis, terukur, terjangkau dan berwawasan masa depan sehingga untuk mewujudkan dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow 2006-2011 sebagai berikut :

“Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru, Yang Bersatu, berbudaya , Berdaya Saing, Maju dan Mandiri”

menuju pengelolaan pembangunan yang baik atau untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan diangkat dari Visi Bolaang Mongondow diatas.

Visi pembangunan tersebut diatas merupakan agenda pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow ke depan yang diterjemahkan dalam kerangka sebagai berikut :

" BOLAANG MONGONDOW BARU "

Merupakan perwujudan komitmen kuat untuk menuju perubahan yang lebih baik, produktif dan dinamis.

"BERSATU"

Mewujudkan komitmen kuat bahwa persatuan dan kesatuan serta ketentraman dan ketertiban dalam wadah NKRI menjadi dambaan masyarakat Bolaang Mongondow.

"BERBUDAYA"

Bahwa masyarakat Bolaang Mongondow patut melestarikan budaya lokal yang telah berurat dan berakar dibumi Totabuan maupun budaya yang positif yang dimiliki oleh etnis dan suku bangsa Indonesia yang hidup, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya budaya sebagai cita, citra, rasa dan karsa yang diterjemahkan padanannya sebagai budi (akal budi) dan daya (daya upaya); mengartikan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman, kita berupaya untuk memajukan Bolaang Mongondow.

"BERDAYA SAING"

Tidak jauh dari budaya berdasar akal dan daya upaya dengan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun Bolaang Mongondow kedepan agar dapat lebih maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

"MAJU"

Berarti modern yaitu kondisi kerangka sosial yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inovatif, beraneka ragam secara fungsional dan memiliki skill yang tinggi.

"MANDIRI"

Dalam hal ini diwujudkan dengan makin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam penentuan kebijakan serta makin kuatnya kemampuan daerah melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam penetapan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, terdapat beberapa mandat yang menjadi pedoman yaitu visi dan misi Pembangunan Nasional 2004-2009, serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2005-2010.

Secara rinci visi misi Nasional dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia, serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, Yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai.
2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan demokrasi.
3. Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera.

Strategi Pokok Pembangunan, Yaitu :

1. Strategi penataan kembali indonesia Yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonsia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonsia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) tetap tegaknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keanekaragaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sedangkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010

adalah “ **Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera**”

1. **Berbudaya**; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang mempunyai budaya modern dan agamais serta berkepribadian/jati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
2. **Berdaya Saing**; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul disegala bidang.
3. **Sejahtera**; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

Misi Provinsi Sulawesi Utara :

1. Mengembangkan suasana kondusif dan mempraktekan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menerapkan clean goverment dan governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib dan disiplin.
4. Menegakan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum dan hak asasi manusia.

5. Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
6. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang.
8. Mengelola secara optimal sumberdaya alam SULUT secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan
10. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global.
11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
12. Meningkatkan pembangunan dikawasan perbatasan.
13. Menurunkan pengangguran, kemiskinan dan mengurangi masalah-masalah sosial.

2. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK TAHUN 2009.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tatanan pemerintahan yang mengedepankan sistem desentralisasi dan otonomi daerah disertai tuntutan perwujudan demokrasi yang nyata dan bertanggung jawab serta dalam pengaruh globalisasi, maka akan ditemui berbagai kendala dan tantangan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan daerah karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga memerlukan dan membutuhkan penanganan yang serius dan matang, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan perencanaan tata ruang kabupaten dan daerah-daerah pemekaran;

Pada tahun 2009 pemerintah akan berupaya meningkatkan daya guna penataan ruang wilayah terutama wilayah daerah pemekaran.

Tantangan utama dibidang penataan ruang yaitu 1). memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang ditingkat pusat dan daerah. 2). Memperkuat dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terutama pada daerah-daerah pemekaran.

2. Peningkatan dan pengembangan dunia pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,

Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat masih merupakan masalah utama bagi Pemerintah dimana masalah yang dihadapi adalah diperlukannya peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan terutama pada jenjang Pendidikan Dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak bersekolah terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil, terutama pesisir pantai yang belum terjangkau oleh layanan Pendidikan. Anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam Pendidikan paling tidak sampai dengan Pendidikan Dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi Pendidikan juga masih terjadi terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya penuntasan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meskipun Pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cukup signifikan untuk jenjang Pendidikan Dasar, namun masih ditemukan sekolah yang masih menarik berbagai iuran sehingga

memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah Perkotaan, sekolah swasta dan sekolah unggulan.

Masalah penting lain yang dihadapi bidang Pendidikan adalah berkaitan dengan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik. Sebaran pendidik tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di daerah Perkotaan. Selain itu, sebagian besar pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut. Upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik penting dilakukan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga satuan-satuan Pendidikan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu. Memasuki era global yang sangat kompetitif diperlukan tenaga-tenaga berpendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas secara memadai.

Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain : disparitas status Kesehatan dan Gizi antar tingkat sosial ekonomi, antara Perkotaan dan Perdesaan ; akses terhadap fasilitas Kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil. Masalah Kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kesakitan seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD), malaria, diare serta masalah gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi

mikro lainnya; belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.

Di bidang Keluarga Berencana, pada tahun 2009 harus terus di berikan perhatian agar tetap terjaga sesuai program Pemerintah dengan memberikan jaminan penyediaan alat/obat KB serta pelayanan KB utamanya bagi penduduk miskin.

3. Mendorong peran masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi serta mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;

Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal tersebut dinilai masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pada tahun 2009 akan terus ditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat luas dalam ikut serta melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, maka untuk memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, langkah ini akan dipercepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, belum terbangunnya penerapan manajemen di berbagai instansi pemerintah yang dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.

4. Penanggulangan bencana alam serta upaya-upaya pencegahan dini bencana alam.

Diharapkan pada tahun 2009 pembangunan fisik, baik sektor perumahan, infrastruktur publik maupun sarana dan prasarana sosial sudah dapat diatasi. Tantangan utama lebih dihadapkan pada usaha untuk membangkitkan kembali usaha kecil dan mikro, guna dapat memperbaiki tingkat kemiskinan yang menurun akibat bencana alam

5. Menurunkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai peningkatan rata-rata 5,93 persen pertahun, namun masih saja terdapat penduduk miskin dimana sampai dengan terbentuknya Kota Kotamobagu berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2007, masih terdapat 1.101 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).

Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain sebagai berikut :

Pertama, pemerataan pembangunan belum dapat menjangkau seluruh perdesaan, penduduk miskin umumnya berada di daerah perdesaan jika di bandingkan dengan penduduk yang berada di pusat kota, kesempatan berusaha di Perdesaan dan di Perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Sementara itu masyarakat di Perdesaan maupun Perkotaan yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro/ usaha kerajinan rumah tangga belum banyak memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktifitasnya yang pada akhirnya tidak dapat menampung tenaga kerja yang tersedia.

Kedua, kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan masih terbatas dan fasilitas dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi, serta Transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan Sarana Transportasi di Perdesaan masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Keseluruhan masalah ini akan di tangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2009 dengan program-program Pembangunan yang lebih terintegrasi.

Ketiga, harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh kemampuan produksi beras belum dapat menjamin permintaan. Sementara itu, kebutuhan pokok selain beras maupun komplemen beras juga belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam daerah. Produksi komoditas tersebut akan terus ditingkatkan untuk menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama beras.

Dalam kaitan itu, percepatan pengurangan kemiskinan pada tahun 2009 dititikberatkan pada upaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin; menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar terutama pada daerah tertinggal dan terisolasi; serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pendekatan utama

yang digunakan adalah melindungi rumah tangga miskin khususnya yang sangat miskin serta meningkatkan keberdayaan rumah tangga miskin dalam satu kelembagaan kelompok masyarakat miskin pada tingkat lokal. Masyarakat miskin didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara kolektif, berbasis masyarakat, serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dalam kaitan itu, kapasitas pemerintahan dan pendampingan langsung kepada masyarakat akan ditingkatkan sehingga mampu mendorong kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dalam menanggulangi permasalahannya.

6. Memperluas penciptaan lapangan kerja.

Pada tahun 2009 di perkirakan akan meningkat sebanyak 18-25 % kesempatan kerja baru, angka pengangguran terbuka masih tetap tinggi yaitu 12,65 persen atau 28.777 jiwa. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja daerah, tingginya angka pengangguran usia muda, serta masih terdapatnya beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja. Hal tersebut merupakan masalah-masalah yang akan ditangani. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh balai-balai pelatihan kerja.

Dengan adanya masalah tersebut di atas, tantangan pengembangan kesempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

Pertama, menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya. Penciptaan lapangan kerja akan dibarengi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk mengembangkan usahanya.

Kedua, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki

produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja. Rendahnya pendidikan, ketrampilan dan kompetensi sebagian besar tenaga kerja menyebabkan terbatasnya kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia sehingga banyak dari tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan produktivitas rendah.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan kesejahteraannya agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.

7. Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas.

Ketersediaan pangan dalam daerah dan akses pangan rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Produksi padi tahun 2008 meningkat.....persen dibanding tahun 2007 dan pada tahun 2008 dan 2009 masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan permasalahan pokok tersebut, penguatan kemampuan produksi pangan dalam daerah; perbaikan sistem distribusi dan tataniaga pangan; pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif produksi bahan pangan; serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan

ditingkatkan. Produksi bahan baku untuk bahan bakar nabati (BBN) sangat besar potensinya dan akan ditingkatkan pemanfaatannya. Meskipun produksi perikanan budidaya meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Masalah-masalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendorong akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.

8. Meningkatkan investasi dan daya saing ekspor.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, namun dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh. Dalam upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri pengolahan hasil, pariwisata, maka akan ditangani secara sungguh-sungguh dengan mengurangi hambatan perizinan, administrasi perpajakan serta meningkatkan kepastian hukum dan keserasian Peraturan Pusat dan Daerah. Adapun peningkatan Pariwisata akan didorong dengan lebih mengembangkan pemasaran Pariwisata, serta mendorong Kemitraan Pariwisata.

9. Penataan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang administrasi umum pada tahun 2009 akan difokuskan pada terwujudnya otonomi nyata, luas dan bertanggung jawab, disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dan penataan kelembagaan dalam rangka terciptanya aparatur yang berkopetensi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Seiring dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu tata nilai yang intinya adalah menghadapi seluruh stakeholders menjadi lebih baik.

10. Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan.

Dukungan infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2009 masih menghadapi masalah dan tantangan antara lain : masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal; masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan arus ekonomi perdagangan.

Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan; masih terbatasnya tingkat jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oleh lemahnya regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan budaya keselamatan, kelayakan prasarana dan sarana serta manajemen transportasi; rendahnya akses terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di Perdesaan; rendahnya investasi dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi. Tantangan yang dihadapi pada sektor transportasi adalah : tidak seimbanginya pertumbuhan lalu lintas (kebutuhan jasa angkutan) dengan pertumbuhan investasi sarana dan prasarana transportasi, termasuk SDM penyelenggara jasa angkutan serta masih tingginya tingkat kecelakaan serta pelanggaran ketentuan dan penyelenggaraan transportasi; terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di Perdesaan menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap

pelayanan angkutan baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan tertinggal; serta adanya undang-undang dan peraturan baik di sektor transportasi maupun investasi yang kurang menarik dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi.

Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain : masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak; serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan. Dengan permasalahan yang dihadapi, pembangunan perumahan dan permukiman memiliki tantangan untuk : menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan munculnya kendala dan tantangan guna perwujudan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah, maka ditetapkan 9 (sembilan) langkah yang menjadi strategi pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

1. Membangun kawasan dengan Ragam Budaya (Multikulturalis);
2. Peningkatan Kualitas Hidup Rakyat;
3. Memelihara Kemajemukan (Pluralisme);
4. Meningkatkan Solidaritas dan kerukunan;
5. Menghidupkan Modal Sosial di Masyarakat;

6. Penerapan Good Governance and Clean Government;
7. Pengarasutamaan Gender;
8. Menumbuhkan Kerjasama Sektor Swasta dan Publik;
9. Penguatan Kerjasama Instansi Horizontal dan Vertikal;

Implementasi langkah-langkah yang menjadi strategi pembangunan daerah tidak lepas dari landasan ideologi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu :

1. Ideologi Politik;
2. Ideologi Ekonomi;
3. Ideologi Sosial Budaya;
4. Ideologi Keamanan dan Ketertiban;

Pelaksanaan 9 (sembilan) langkah yang menjadi strategi pembangunan daerah yang dilandasi dengan ideologi tersebut di atas, saling terkait satu sama lain dan telah sejalan dengan konsep-konsep dasar pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJM Provinsi Sulawesi Utara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Konsep pembangunan berorientasi pada masyarakat (*people oriented*) dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (*Socially accepted*).
2. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan sejak dari perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan, agar masyarakat dapat berperan serta dan diberdayakan dalam pembangunan daerah (*people participation and empowerment*).
3. Pembangunan daerah diselaraskan dengan budaya, norma-norma, serta adat istiadat masyarakat setempat (*culturally appropriate*) dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional dan global.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*environmentally sound and sustainable development*).

5. Pelaksanaan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kabupaten serta tidak diskriminatif (*distribution of development and non-discrimination*).
6. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah (*community-private-local government-partnership*).
7. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada clean goverments and good governance.
8. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*).

Konsep-konsep dasar pembangunan seperti dijelaskan di atas, serta keunikan wilayah dan posisi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam konteks nasional dan regional, memerlukan suatu konsep pendekatan pembangunan khusus. Pendekatan pembangunan tersebut harus dapat merespon secara langsung kebutuhan masyarakat yang merepresentasikan *bottom-up needs* dikombinasikan dengan kemampuan sumberdaya, kebijakan, dan program pemerintah (nasional dan daerah) agar dapat meredistribusi secara efisien dan adil sumberdaya, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

B. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN.

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan 2008 serta tantangan yang dihadapi tahun 2009, tema pembangunan adalah *Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran*.

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, terdapat 6 (Enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi Pemerintah yaitu:

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.

] Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi berkelanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumberdaya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

] Pengarusutamaan gender.

Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan dan kontrol serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.

] Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (*good governance*).

Tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah

secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata pemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.

] Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

] Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Meningkatkan kegiatan pembangunan lebih banyak di tingkat kecamatan, maka peran serta pemerintah kecamatan perlu terus ditingkatkan, melalui pendesentralisasian tugas-tugas pelayanan yang sudah dan layak dikelola agar pembangunan akan lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna sekaligus mendekatkan pelayanan sehingga hasil-hasil pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dijalankan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2006 – 2011 meliputi Program Supremasi Hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Agribisnis, Kelautan dan Perikanan, Infrastruktur, Perdagangan, Pemerintahan yang baik (*good*

governance) serta diikuti oleh Program penunjang yang menjadi perhatian Pemerintah adalah : Program di Bidang Politik, Agama, Sosial Budaya/Kemasyarakatan, Pengembangan Wilayah, Keamanan dan Ketertiban, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Program khusus penanggulangan bencana alam dan lahan kritis.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berpedoman/mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 serta RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow yang disinkronkan dengan Program dan Kegiatan menurut Urusan Daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2006 – 2011, kemajuan yang dicapai tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 serta sebagai masalah dan tantangan pokok yang dipecahkan dan dihadapi tahun 2009 maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi dan Kesempatan Kerja.
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

Dengan adanya ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan nasional ini, maka seluruh tingkat pemerintahan yang ada, mulai dari

Pusat, Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional ini kedalam rencana program dan kegiatan pembangunan khususnya tahun anggaran 2009 dengan tetap memperhatikan kondisi nyata masing-masing daerah.

Prioritas Pembangunan Tahun 2009 ini di tempuh dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

I. PENINGKATAN INVESTASI DAN KESEMPATAN KERJA.

SASARAN :

Sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Investasi dan Kesempatan Kerja :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran serta terciptanya lapangan kerja baru;
2. Meningkatnya Investasi serta tumbuhnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peran serta masyarakat dan pemerintah;
3. Tumbuhnya Industri Pengolahan Hasil dan industri rumah tangga;
4. Terbangunnya kerja sama dibidang investasi baik dalam maupun luar negeri melalui perbaikan pelayanan perijinan, administrasi dan perpajakan.

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1 : Peningkatan Pelayanan, Pendataan Penduduk, Catatan Sipil dan Perluasan Kerja.

- î Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
- î Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- î Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
- î Pengembangan Data Base Kependudukan.

- î Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
- î Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- î Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri.
- î Pembinaan dan Pelatihan untuk Peningkatan SDM Transmigrasi Kakenturan.
- î Redesain RTSP Mataindo
- î Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegasan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- î Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja, Bursa Kerja dan Lembaga Latihan Swasta.
- î Tenaga Kerja Mandiri
- î Perluasan Kesempatan Kerja
- î Pengembangan Kelembagaan
- î Pembentukan Bipartir Antara Pekerja dan Pengusaha.

Fokus 2 : Peningkatan Produktivitas Koperasi, Pasar, Perdagangan dan Perindustrian.

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- î Penyediaan jasa alat tulis kantor.
- î Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
- î Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- î Pengadaan mebeleur.
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- î Pendidikan dan pelatihan formal.
- î Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- î Perencanaan, koordinasi dan pengembangan (UKM) Usaha Kecil Menengah.
- î Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- î Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi UKM.
- î Pengembangan Kluster bisnis
- î Pembinaan pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi.
- î Penyediaan surat menyurat
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Tersedianya alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- î Pengadaan kendaraan dinas/opersional
- î Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- î Pembuatan drainase dan pengaspalan jalan
- î Pengadaan peralatan retribusi
- î Penataan kode kios
- î Rehabilitasi Pasar Ibolia
- î Pembangunan Pasar Bersih di Kecamatan Lolak
- î Promosi dan Investasi
- î Pelatihan dan pengembangan produk industri.
- î Peningkatan perlindungan konsumen
- î Peningkatan disiplin dan profesionalisme
- î Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Fokus 3 : Meningkatkan Produktifitas Perikanan dan Kelautan.

- î Penyediaan jasa surat menyurat.
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- î Penyediaan jasa alat tulis kantor.
- î Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- î Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- î Penyediaan makanan dan minuman.
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- î Pengadaan peralatan gedung kantor
- î Pengadaan mebeleur
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapan
- î Pengadaan pakaian KORPRI.
- î Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD.
- î Penyusunan laporan semesteran.
- î Penyusunan laporan program realisasi anggaran.
- î Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- î Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- î Sosialisasi program pembangunan kelautan dan perikanan.
- î Pengembangan statistik perikanan.
- î ISDD pangkalan pendaratan ikan Labuan Uki, Torosik dan ISDD Balai Benih Ikan Air Tawar Cempaka
- î Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
- î Pembangunan pangkalan bahan bakar minyak (SPDN) untuk nelayan.
- î Pangkalan modal masyarakat
- î Pengembangan bibit ikan unggul

- î Peningkatan sarana budidaya perikanan
- î Peningkatan dan pengembangan perikanan (Pendamping DAK)
- î Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya (Pendamping DAK).
- î Pendampingan pada Kelompok pembudidaya ikan
- î Pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan budidaya
- î Penyuluhan budidaya kelautan
- î Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- î Peningkatan dan pengembangan sarana perikanan tangkap
- î Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap (pendamping DAK).
- î Pembinaan dan Pengembangan Perikanan tangkap (pendamping).
- î Pendamping pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
- î Pelatihan teknis dan manajemen usaha kelompok nelayan perikanan tangkap.
- î Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- î Penguatan penerapan sistem rantai dingin
- î Peningkatan dan pengembangan sarana pengolahan hasil perikanan.
- î Pelatihan teknis dan manajemen usaha pengolahan hasil perikanan.
- î Promosi potensi dan hasil unggulan laut.
- î Pengembangan pengelolaan laut dan perairan.
- î Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengaman sumber daya kelautan dan perikanan.
- î Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengaman sumber daya kelautan dan perikanan.
- î Oprasional sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- î Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
- î Sosialisai peraturan daerah wilayah pesisir.

Fokus 4 : Meningkatkan Produktifitas Pertambangan dan Energi

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan

- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan peralatan survey geologi lapangan
- î Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional kantor
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Penyusunan regulasi bidang pertambangan umum
- î Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C.
- î Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan.
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- î Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
- î Penyebaran peta daerah rawan bencana
- î Pengumpulan dan pemutakhiran data lapangan
- î Pengembangan dan pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik.
- î Pemetaan zonasi bahan galian industri.
- î Pengawasan dan penertiban bagi agen yang melanggar aturan.
- î Estimasi terhadap konsumsi BBM secara periodik dan langkah-langkah preventif bila terjadi kelangkaan BBM.
- î Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.

II. REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA KELUARGA SEJAHTERA.

SASARAN :

Sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Revitalisasi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat serta Keluarga Sejahtera :

1. Meningkatnya Pangan dan Akses Pangan bagi Rumah Tangga.
2. Meluasnya Kesempatan Kerja dan Meningkatnya Keragaman/ Diversifikasi Usaha Ekonomi Perdesaan.
3. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas.

4. Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan melalui penataan kembali kegiatan usaha tani.

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1 : Revitalisasi Pembangunan Bidang Pertanian

- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- î Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
- î Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/peternakan tepat guna (DAK)
- î Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/peternakan tepat guna (Dana pendamping)
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- î Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- î Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
 - *Pembibitan dan perawatan ternak*
 - *Pengembangan agribisnis peternakan*

- î Pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas (TP).
- î Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (PNPM-P).
- î Revitalisasi unit pelayanan jasa alsitan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA).
- î Pengembangan fasilitas pelayanan agroindustri terpadu
- î Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan.
- î Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan (PNPM).
- î Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan.
- î Mekanisme kegiatan produksi primer
- î Perbaikan mekanisme subsidi
- î Penyusunan kebijakan program, monev dan data base
- î Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan.
- î Inseminasi Buatan (IB)
- î Agribisnis peternakan
- î Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan IM3
- î Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan pertanian
- î Upaya khusus kedelai (UPSUS)
- î Bantuan langsung benih unggul (BLBU)
- î Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis
- î Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
- î Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- î Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- î Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
- î Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian perkebunan.
- î Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor

- î Penyediaan Alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- î Penyediaan Makanan dan Minuman
- î Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan
- î Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
- î Pemanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- î Pemanfaatan dan analisis akses pangan masyarakat
- î Penanganan pasca panen dan pengolahan
- î Pengembangan cadangan pangan daerah
- î Pengembangan desa mandiri pangan
- î Pengembangan lumbung pangan
- î Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- î Koordinasi kebijakan perberasan
- î Penyuluhan sumber pangan alternative
- î Koordinasi dewan ketahanan pangan
- î Sistem informasi pasar
- î Pengembangan Hutan Tanaman
- î Pengembangan hasil hutan non kayu
- î Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- î Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
- î Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- î Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan nasional Rehabilitasi hutan dan lahan (Program GERHAN).
- î Konservasi Tanah
- î Pertanian tanaman palawija, padi, gogoroncah.
- î Perluasan areal perkebunan.

Fokus 2 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- î Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
- î Pengadaan kendaraan dinas roda 2 untuk kebutuhan pada sekretariat BPMD.
- î Pengadaan komputer (Laptop)
- î Pengadaan AC
- î Pengadaan kursi dan meja tulis
- î Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
- î Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan
- î Penyelenggaraan desiminasi dan intermasi bagi masyarakat desa.
- î Pelatihan manajemen bumdes peranan peningkatan kapasitas pemerintah atau kapasitas aparatur pemerintah desa.
- î Pelatihan aparatur pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
- î Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan (P3MD).
- î Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bid. usaha ekonomi produktif (P2W-KSS).
- î Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- î Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
- î Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM)
- î PNPM mandiri perdesaan
- î Pembinaan/pembangunan pasar desa
- î Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

III. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM.

SASARAN :

Sasaran Pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum :

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi melalui Peningkatan Keandalan Kondisi Prasarana dan Sarana Operasi Pelayanan

2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang menjangkau masyarakat melalui pembangunan transportasi di kawasan perbatasan/perdesaan
3. Meningkatnya kualitas layanan akses telekomunikasi dan Informatika di perdesaan
4. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan
5. Meningkatnya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan peningkatan arus ekonomi perdesaan

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1: Peningkatan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum

- î Penyediaan jasa surat menyurat
 - î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - î Penyediaan alat tulis kantor
 - î Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - î Pengadaan kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2)
 - î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - î Pendidikan dan pelatihan formal
 - î Perencanaan pembangunan jalan
- Pembangunan Jalan dan Jembatan*
- î Peningkatan Jalan Negara - Kantor Bupati
 - î Peningkatan Jalan Pelabuhan - Kantor Bupati

- î Peningkatan Jalan SPBU - Ex. TMMD Lolak
- î Peningkatan Jalan Desa Tombolango
- î Peningkatan Jalan Desa Toraut
- î Peningkatan Jalan Makaruo
- î Peningkatan Jalan Masuk Rumah Jabatan Bupati
- î Peningkatan Jalan Posilagon - Puskesmas
- î Peningkatan Jalan Panango - Kima
- î Peningkatan Jalan Desa Dumoga I
- î Peningkatan Jalan Ayong - Babo
- î Peningkatan Jalan Buyandi - Molobog
- î Peningkatan Jalan Sekitar Imandi
- î Peningkatan Jalan Siniyung - Wuwuk Mobagu
- î Peningkatan Jalan Mopusi - Mengkang
- î Peningkatan Jalan Onggunoi - Kinali
- î Peningkatan Jalan Pusian - Mokintop
- î Peningkatan Jalan Mooat - Atoga
- î Peningkatan Jalan Tapa'aog - Uluan Pusian
- î Peningkatan Jalan Otam - Gardu PLN
- î Peningkatan Jalan Lolayan - Tungoi
- î Peningkatan Jalan Matabulu - Jiko Belanga
- î Peningkatan Jalan Tutuyan - Goba
- î Peningkatan Jalan Desa Dodap Atas
- î Peningkatan Jalan Matandoi - Pelabuhan
- î Peningkatan Jalan Werdhi Agung Barat
- î Peningkatan Jalan Tolondadu - Pelabuhan
- î Peningkatan Jalan Meyambaga
- î Peningkatan Jalan Desa Bakida
- î Peningkatan Jalan Desa Matayangan
- î Peningkatan Jalan Mopuya Utara - Mopugat Selatan
- î Peningkatan Jalan Desa Manembo
- î Peningkatan Jalan Sinsingon - Mobuya
- î Peningkatan Jalan Sinsingon - Pogat
- î Peningkatan Jalan Desa Uuan

- î Peningkatan Jalan Bongkudai - Binuang
- î Peningkatan Jalan Poigar - Perkebunan
- î Peningkatan Jalan Bulawan - Bukaka
- î Peningkatan Jalan Desa Modisi
- î Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- î Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Lion
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Mamalia - Pelabuhan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Ibolian
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP.4 AKD - Tadoy
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Pinogaluman - Dumara
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Pinogaluman - Labuhan Uki
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Lalow - Lalow Pantai
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Pasar Lolak
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP.2 AKD - Mariri Baru
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP.3 AKD - Nonapan II
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Passi - Lobong
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP Bongkudai Baru - Guaan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Imandi - Tambun
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP Bongkudai Baru SP. Insil
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Matali Baru - Torosik
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Kosio - Tumokang Baru
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Mopait - Monsi
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Wangga - Lobong
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Bilalang - Bintau
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Bongkudai - Liberia
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Poyowa Besar - Lolayan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Imandi - Mogoyunggung
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Ayong - Bumbang
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Nuangan - Loyow
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Doloduo - Doloduo
- î Pemeliharaan Berkala Jalan IKK Lolayan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Ibolian I

- î Pemeliharaan Berkala Jalan IKK Passi
- î Pemeliharaan Berkala Jalan IKK Bolaang Uki
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Lanud - Sarirasa
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Dumoga I
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Bai - Idumun
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Bangunan Wuwuk - Liberia
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Poigar - Sandakan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Adow
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Paret - Pelabuhan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Paret
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Bantik
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Bolaang - Tadoy
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Toluaya
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Tolutu - Sinombayuga
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pangia
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Tabilaa
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Saibuah
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Bulud
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pangian
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sinsingon
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Bilalang - Apado
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Lolan - Mariri Lama
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Tudu'Aog - Poigar
- î Pemeliharaan Berkala Jalan IKK Nuangan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Tuyat
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Mopugat Utara
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Kinomaligan
- î Pemeliharaan Berkala Jalan Tonom - Ibolian
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Bilalang - Tudu'Aog
- î Pemeliharaan Rutin Jalan SP. Motongkad - Atoga
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Gogaluman - Tiberias
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Moayat - Tungoi
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Kopandakan - Tungoi

- î Pemeliharaan Rutin Jalan Dumoga - Tambun
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Doloduo - Toraut
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Dodap Atas - Dodap Bawah
- î Pemeliharaan Rutin Jalan Kosinggolan - Kinali
- î Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- î Penyusunan sistem informasi/data base jalan
- î Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
- î Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- î Master Plan Air Bersih Kota Lolak
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Molobog
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wineru
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bukaka
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Torosik
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mariri Baru
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Modisi
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Matabulu
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bumbang
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Buntalo
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa
- î Desa Solimandungan II
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wangga Baru
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Dayow
- î Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sakti
- î Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Tutuyan
- î Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Adow
- î Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Mopuya Utara
- î Master Plan Drainase Kota Lolak
- î Pembangunan Drainase Desa Lion (2.170 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Bongkudai Induk (600 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Bongkudai Induk (2.000 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Bangunan Wuwuk (1.500 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Moyongkota Barat(1.300 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Mariri Lama (3.000 M')

- î Pembangunan Drainase Desa Mamalia (2.000 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Kotabunan (3.000 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Bulawan (2.000 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Dodap I (1.500 M)
- î Pembangunan Drainase Desa Dodap II (1.000 M')
- î Pembangunan Drainase Desa Kopandakan II (750 M ')
- î Pengembangan KTP2D (5 Desa)
- î Pembangunan PSD Permukiman Persisir/Nelayan (5 Desa)
- î Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan (5 Desa)
- î Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
- î Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
- î Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
- î Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
- î Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.
- î Pengadaan alat-alat berat
- î Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Fokus 2 : Peningkatan Sumber Daya Air

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi diluar dan dalam daerah
- î Penyediaan alat-alat rumah tangga
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.
- î Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

- î Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
- î Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
 - *Sungai Salongo*
 - *Sungai Motongkad*
 - *Sungai Pinaingan*
 - *Sungai Mopusi*
 - *Sungai Bolaang*
 - *Sungai Lolan*
 - *Sungai Gogaluman & Saluran Pembuangan Tiberias*
 - *Sungai Lolanan*
 - *Sungai Dulangon*
 - *Sungai Mokoantor*
- î Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
 - *Pantai Nuangan*
 - *Pantai Lion*
 - *Pantai Molibagu*

Fokus 3 : Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan perlalatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Penyusunan sistem pendaftaran tanah.
- î Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Bolaang Mongondow Dalam Angka).
- î Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi (PDRB).
- î Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
- î Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

- î Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- î Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan.
- î Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (P2TPD).
- î Penyusunan rancangan RPJPD
- î Penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS 2010.
- î Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- î Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
- î Penyusunan indikator ekonomi dan profil daerah
- î Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi/fasilitasi tim kerja investasi bolaang mongondow.
- î Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
- î Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
- î Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya/PMI.
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Fokus 4 : Peningkatan Aksesibilitas di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- î Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

- î Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- î Pengadaan rambu-rambu lalu lintas traffic light
- î Pengadaan marka jalan
- î Pemeliharaan rutin - berkala kendaraan dinas/operasional
 - *Pembangunan Gedung Terminal*
 - *Halte Bus 6 buah*
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- î Pengadaan dan peningkatan fasilitas pada obyek wisata Pantai Pasir Putih.
 - *Pembuatan tanggul 400 m*
 - *Pembuatan 3 unit cottage*
 - *Pembuatan jalan setapak*
 - *Pembuatan areal parkir*
 - *Pengadaan 2 buah perahu pesiar*
 - *Pembuatan 6 buah shelter*
 - *Pembuatan rumah jaga / pos jaga*
- î Pengadaan dan peningkatan fasilitas pada obyek wisata Spa Bakan.
 - *Pembuatan tembok keliling 150 M*
 - *Pengadaan lahan untuk pembuatan obyek wisata seluas 2 Ha*
 - *Pengadaan alat mainan anak - anak*
 - *Pengadaan 1 unit sumur bor untuk sumber air dingin*
 - *Rehab ringan bangunan pada obyek wisata*
 - *Perbaikan drainase*
 - *Perbaikan 3 buah kolam*
- î Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas pada obyek wisata Danau Mo'oat
 - *Perbaikan perahu pesiar katamaram*
 - *Perbaikan 1 unit kamar mandi / WC*
 - *Pengadaan 2 unit perahu pesiar*
 - *Perbaikan 1 unit motor tempel*
 - *Perbaikan 4 rumah adat dan 2 cottage*
 - *Perbaikan gedung musholla*
 - *Perbaikan 1 unit motor tempel*
 - *Perbaikan 4 rumah adat dan 2 cottage*
 - *Perbaikan gedung musholla*
 - *Perbaikan tempat bermain anak - anak*
 - *Pembuatan gedung restoran*

- î Pengadaan dan peningkatan fasilitas pada obyek wisata Pantai Lolan.
 - *Pengadaan jaringan air bersih*
 - *Pembuatan 4 buah shelter*
 - *Pembuatan panggung kesenian*
 - *Pembuatan Gapura*
 - *Pemugaran lokasi obyek*
- î Pengembangan pemasaran pariwisata/pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan seni budaya daerah.
 - *Pemilihan Nanu dan Uyo Bolaang Mongondow Tahun 2009*
 - *Melaksanakan festival Totabuan*
 - *Pembinaan sanggar seni budaya dan adat daerah*
 - *Mengikuti kegiatan pameran produksi dan pariwisata*
 - *Pagelaran Seni Budaya Bolaang Mongondow Keluar Daerah*
- î Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- î Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- î Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- î Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS
- î Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional.
- î Penyediaan administarsi keuangan
- î Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- î Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- î Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- î Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
- î Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
- î Pengadaan alat studio dan komunikasi
- î Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi
- î Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- î Kegiatan penyebarluasan yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat.

- î Penunjang operasional Dinas Infokom
- î Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- î Pelatihan SDM dalam bidang teknis komunikasi dan informasi
- î Diklat struktural dan fungsional
- î Kursus ketrampilan / keahlian khusus
- î Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- î Workshop
- î Temu lintas sektor
- î Studi banding

IV. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

SASARAN :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

1. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi
2. Meningkatnya proporsi sekolah yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan
4. Meningkatnya proporsi pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang di syaratkan
5. Meningkatnya kesejahteraan pendidikan
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga Miskin
7. Meningkatnya persentasi penanganan kesehatan
8. Meningkatnya persentasi penanganan ibu hamil
9. meningkatnya persentasi balita yang mendapat pelayanan kesehatan
10. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif
11. Meningkatnya jumlah peserta KB baru

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1: Peningkatan Kualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan kesehatan
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- î Pengadaan meubelair
- î Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Insentif pegawai eselon II,III dan IV
- î Pemberian penghargaan purna bakti/masa pensiun
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- î Penyusunan laporan keuangan semesteran
- î Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- î Pembangunan gedung Sekolah
- î Pembangunan ruang kelas sekolah
- î Penambahan ruang kelas sekolah
- î Pembangunan sarana dan prasarana bermain
- î Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

- î Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
- î Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
- î Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.
- î Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- î Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- î Pelatihan penyusunan kurikulum
- î Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
- î Pembinaan SMP terbuka
- î Penambahan ruang kelas baru SMP, SMPLB
- î Penyediaan biaya bantuan operasional sekolah (BOS)
- î Penyediaan buku pelajaran untuk SD, SDLB, dan SMP
- î Penyelenggaraan paket B setara SMP
- î Pembinaan minat, bakat dan keratifitas siswa
- î Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar.
- î Pembangunan gedung sekolah
- î Penambaha ruang kelas sekolah
- î Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS).
- î Pembangunan perpustakaan sekolah
- î Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- î Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- î Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- î Pelatihan penyusunan kurikulum
- î Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
- î Pengembangan alternatif pelayanan pendidikan menengah untuk daerah pedesaan.
- î Penyelenggaraan Paket C setara SMA.
- î Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- î Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
- î Pemberian bantuan operasional dan pendidikan non formal
- î Pemberian pendidikan kursus dan kelembagaan

- î Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
- î Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
- î Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
- î Pelaksanaan sertifikasi pendidik
- î Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- î Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
- î Pembinaan kelompok kerja guru
- î Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
- î Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- î Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- î Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.
- î Pelaksanaan kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan
- î Pembinaan dewan pendidikan
- î Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang isu pendidikan.
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum DAK)

Fokus 2 : Peningkatan kualitas di Bidang Kesehatan

- î Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- î Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin.
- î Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
- î Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
- î Revitalisasi sistem kesehatan
- î Peningkatan kesehatan masyarakat
- î Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
- î Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan.
- î Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

- î Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- î Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- î Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- î Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
- î Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
- î Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- î Penanggulangan, pemantauan dan pelacakan kasus Kurang Energi Protein (KEP).
- î Anemi Gizi besi (AGB)
- î Kurang Vitamin A (KVA) dan kurang zat gizi mikro
- î Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- î Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- î Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
- î Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- î Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- î Peningkatan imunisasi
- î Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah.
- î Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Pembangunan puskesmas
- î Pembangunan puskesmas pembantu
- î Pengadaan puskesmas keliling
- î Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
- î Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
- î Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
- î Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

- î Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Penyuluhan kesehatan anak balita
- î Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Pelayanan pemeliharaan kesehatan
- î Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
- î Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah Tangga
- î Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- î Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- î Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa kebersihan
- î Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik
- î Penyediaan peralatan rumah tangga
- î Pengadaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pemeliharaan rutin berkala ambulance/jenasah
- î Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah sakit
- î Pembangunan gedung rumah sakit
- î Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
- î Pengadaan obat-obatan
- î Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit

- î Pemeliharaan rutin berkala rawat inap
- î Pemeliharaan alat-alat kesehatan
- î Peningkatan kemitraan kualitas dokter dan paramedis
- î Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu.
- î Penyediaan pelayanan kb dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
- î Pelayanan KIE
- î Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
- î Pelaksanaan kegiatan promosi KHIBA melalui :
 - *Kegiatan Lantainisasi*
 - *Manunggal KB Kes dan KB Bhayangkari Kes*
- î Pembinaan keluarga berencana
- î Pengadaan sarana monilitas tim KB keliling (MUPEN)
- î Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
- î Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
- î Pelayanan konseling KB
- î Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- î Pengadaan obat/alat kontrasepsi
- î Pelayanan KB medis operasi
- î Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
- î Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
- î Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- î Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok.
- î Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
- î Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh dan kembang baik.
- î Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
- î Pengkajian pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU.
- î Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- î Operasional institusi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan

pendataan keluarga.

Fokus 3 : Peningkatan kualitas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Pengadaan pakaian serta perlengkapannya
- î Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- î Fasilitas aksi bakti sosial kepemudaan
- î Penyuluhan pencegahan narkoba dikalangan generasi muda
- î Operasional kominda olahraga prestasi di tingkat daerah
- î Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- î Peningkatan Sumberdaya manusia pengelolaan cabang olahraga
- î Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

V. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

SASARAN :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan :

1. Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin
3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatnya peran serta masyarakat (gender) dalam rangka upaya peningkatan/pemberdayaan perempuan.

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1: Peningkatan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

- î Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, lanjut usia dan anak terlantar.
- î Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak cacat dan anak nakal.
- î Penangan masalah-masalah strategis yang tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
- î Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
- î Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- î Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
- î Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan makan dan minum
- î Rapat-rapat koordinasi dan perlengkapan kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Penyediaan pakaian dinas serta perlengkapan lainnya

VI. PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

SASARAN :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang antara lain di tandai dengan:

- Ø Makin efisien dan efektifnya penggunaan anggaran
- Ø Berkurangnya penyalahgunaan wewenang (KKN) dilingkungan birokrasi pemerintahan
- Ø Meningkatnya kinerja birokrasi, antara lain dalam memberikan pelayanan publik
- Ø Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
- Ø Meningkatnya Investasi Kabupaten Bolaang Mongondow 10 % per Tahun
- Ø Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1: Peningkatan Pelayanan dan Penanganan Pelaksanaan Pemerintahan di Bidang Kemasyarakatan.

- î Penyediaan jasa surat menyurat
- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- î Penyediaan jasa alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.

- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan peralatan rumah tangga
- î Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
- î Penyediaan bahan logistik kantor
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- î Jasa Kehumasan
- î Pengadaan mebeuler
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- î Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pengadaan pakaian Korpri
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- î Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.
- î Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- î Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- î Pembahasan rancangan peraturan daerah
- î Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- î Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
- î Rapat-rapat paripurna
- î Kegiatan reses
- î Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
- î Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- î Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Fokus 2: Peningkatan Pelayanan di Bidang Administrasi dan Pemerintahan Umum.

Bagian Hukum :

- î Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.
- î Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan
- î Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
- î Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
- î Publikasi peraturan perundang-undangan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.

Bagian Tata Pemerintahan :

- î Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.
- î Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (MONEV) perangkat kecamatan, desa dan kelurahan.
- î Rapat koordinasi apel pika tingkat provinsi
- î Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- î Pemutakhiran data kodefikasi wilayah dan data administrasi pemerintahan.
- î Bimbingan teknis dan diklat aparatur pemerintahan kecamatan
- î Pelayanan sistem administrasi perkantoran
- î Operasionalisasi sekretariat DESK PILKADA Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bagian Perekonomian :

- î Program koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha.
- î Kajian kebijakan penanaman modal pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.
- î Program penyederhanaan prosedur perizinan dan pengawasan pelayanan penanaman modal.
- î Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial :

- î Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- î Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT.
- î Pembinaan organisasi perempuan
- î Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- î Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- î Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat :

- î Kerjasama informasi dengan mass media
- î Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa
- î Peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi.
- î Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- î Kerjasama Informasi dengan mass media

Bagian Pembangunan :

- î Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengadaan, Standar Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- î Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- î Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- î Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Bagian Umum dan Perlengkapan :

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- î Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan jasa kebersihan
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan makan dan minum
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung antor
- î Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

- î Peningkatan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- î Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
- î Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- î Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- î Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
- î Pembanguna gedung Kantor
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
- î Evaluasi apraisal aset/barang
- î Pembinaan dan pengembangan sumberdaya jaringan komunikasi dan informasi.
- î Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi.
- î Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah.

Bagian Pemerintahan Desa :

- î Pedoman penyusunan pengelolaan keuangan desa
- î Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
- î Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
- î Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
- î Penguatan manajemen pemerintahan desa

Bagian Organisasi Keuangan :

- î Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2009
- î Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah
- î Perubahan ABD 2009
- î Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
- î Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

Bagian Organisasi Kepegawaian :

- î Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- î Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- î Peyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- î Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
- î Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

- î Penyederhanaan prosedur perizinan dan pengawasan pelayanan penanaman modal
- î Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Fokus 3 : Peningkatan Pelayanan di Bidang Kepegawaian.

- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)
- î Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya
- î Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- î Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah
- î Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
- î Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
- î Seleksi Penerimaan CPNS Daerah
- î Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
- î Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Fokus 4 : Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan di Bidang Kearsipan.

- î Pemasarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya pembelajar.
- î Pengembangan minat dan budaya baca.
- î Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat.
- î Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan.
- î Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca.

Fokus 5 : Peningkatan Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- î Penyediaan jasa komunikasi sda dan listrik.
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- î Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- î Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- î Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan
- î Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Fokus 6 : Optimalisasi Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah.

- î Penyelenggaraan kegiatan administrasi dinas
- î Pemeliharaan gedung perkantoran
- î Pemeliharaan kendaraan dinas
- î Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpajakan
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.
- î Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pengembangan sistem pelayanan pengurusan fiskal bagi wp model bank berjalan.
- î Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- î Sosialisasi sistem dan prosedur perhitungan dan penetapan njob melalui tatap muka dan penyebaran brosur.
- î Sosialisasi peningkatan peran aktif camat, sangadi/lurah dalam memotivasi wajib pajak untuk membayar PAD serta melaporkan potensi subyek dan objek PAD di wilayah masing-masing.
- î Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- î Pengumpulan, updating data wajib pajak PAD.

- î Pemutahiran data subjek dan objek PBB.

VII. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri .

SASARAN :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri:

1. Meningkatkan Pengendalian Keamanan
2. Penegakkan Peraturan Daerah
3. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1 : Pembinaan Wawasan Kebangsaan

- î Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- î Penyediaan makanan dan minuman
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar dan dalam daerah
- î Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- î Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- î Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.
- î Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- î Operasional KOMINDA
- î Diklat deteksi dini/pembekalan tugas-tugas intelijen
- î Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- î Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- î Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- î Pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda
- î Penyuluhan kepada masyarakat
- î Koordinasi forum-forum diskusi politik
- î Penyusunan data base partai politik
- î Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- î Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- î Diklat PBP Satuan Linmas

Fokus 2 : Penanganan Ketertiban dan Ketentraman.

- î Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- î Pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban ketentraman & ketertiban tindak kriminal.
- î Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kermanan dan ketertiban.
- î Pembinaan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
- î Pelayanan adminstrasi perkantoran

VIII. PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

SASARAN :

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular :

1. Meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana

2. Meningkatkan pemberantasan penyakit menular
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
4. Peningkatan Perlindungan Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN, FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS :

Dalam pencapaian pembangunan tersebut di tempuh arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Fokus, Program dan Kegiatan prioritas dibawah ini :

Fokus 1: Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- î Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- î Penyediaan jasa administrasi keuangan
- î Penyediaan jasa kebersihan kantor
- î Penyediaan alat tulis kantor
- î Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- î Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- î Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- î Pengadaan perlengkapan kerja kantor
- î Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- î Pengadaan kendaraan dinas/oprasiional
- î Pendidikan dan pelatihan formal
- î Pengumpulan bahan-bahan referensi teknis AMDAL dan peraturan perundang-undangan.
- î Inventarisasi identifikasi masalah kerusakan lingkungan hidup
- î Kursus/Pelatihan Sumber Daya Manusia
- î Penyuluhan/pelatihan bagi masyarakat
- î Monitoring dan evaluasi
- î Pengadaan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan.
- î Pemantauan kualitas air
- î Pemantauan daerah penyangga sumber daya air
- î Pemantauan priodik valume sampah
- î Pengadaan mesin pengolahan sampah
- î Pemantauan RKL, UKL Industri
- î Penyusunan laporan lingkungan hidup daerah

- î Penyusunan laporan kualitas air
- î Penyusunan laporan priodik volume sampah
- î Publikasi informasi lingkungan
- î Pemetaan daerah rawan bencana
- î Penanaman pohon disekitar mata air
- î Penanaman pohon ruang terbuka hijau
- î Pembuatan tanggul penahan longsor
- î Penanaman pohon penguat tanah bantaran DAS Dumoga
- î Pembuatan tanggul penahan abrasi pantai
- î Kalpataru
- î Adipura
- î Adiwiyata
- î Hari Lingkungan Hidup
- î Eko Wisata
- î Gerakan Berlian Sekar
- î Sosialisasi Cinta Lingkungan
- î Lomba sehat lingkungan antar kantor
- î Pengadaan kotak sampah

Fokus 2 : Peningkatan Perlindungan Kepada Masyarakat.

- î Pembentukan satuan kemanan lingkungan masyarakat
- î Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba.
- î Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
- î Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
- î Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
- î Pembentukan satuan koordinasi pelaksana (satkorlak) penanggulangan bencana.
- î Pembangunan gedung SATKORLAK.
- î Penyediaan jasa perlengkapan masyarakat pengungsi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 memberi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2008, perkiraan tahun 2009 dan sasaran Tahun 2009 serta kebutuhan, sumber dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2009 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

A. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2009.

Kondisi ekonomi makro daerah yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Kependudukan dan Tenaga Kerja, serta Pendapatan Daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas wilayah 43,28 % dari luas Provinsi Sulawesi Utara secara potensi ekonomi memainkan peran yang besar. RPJMD Bolaang Mongondow Tahun 2006 – 2011 merupakan manivestasi dari peran Kabupaten Bolaang Mongondow kedepan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menggemban amanat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kondisi riil ekonomi makro Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 dapat dilihat dari data statistik yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah dengan gambaran penghitungan beberapa agregat PDRB Perkapita. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi makro, masih mengacu pada data Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode

waktu tertentu. Laju pertumbuhan dihitung dari data PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Kurun waktu lima tahun terakhir PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow, mengalami peningkatan dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan Tahun 2011. Pertumbuhan perekonomian ini merupakan akibat dari meningkatnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bolaang Mongondow yang cukup signifikan. Indikator tersebut juga memberikan indikasi tentang sejauh mana dampak dari aktivitas perekonomian selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow pada Tahun 2006 sebesar 4,87 % . Laju pertumbuhan ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2005 yaitu sebesar 11,69 %. Sedangkan pada Tahun 2007 mengalami koreksi kenaikan menjadi sebesar 5,00 % (dihitung berdasarkan Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum pemekaran).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow
Tahun 2003 – 2007**

T a h u n	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
2003	3,47	2,89
2004	4,80	4,45
2005	11,69	4,90
2006	4,87	6,16
2007 *)	5,00	Blm diketahui

**) Angka sementara, BPS Kab. Bolaang Mongondow, 2007*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami pertumbuhan secara drastis pada tahun 2005 sebesar 11,69 %, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut kontribusi sektor

pertambangan meningkat secara drastis, sebagai dampak mulai beroperasinya secara komersil perusahaan pertambangan PT Avocet di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun tersebut, sehingga output sektor pertambangan turut mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008 mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2007 meningkat sebesar 16,30 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari Rp. 3.071.776.000.000,- pada Tahun 2006, menjadi Rp. 3.572.561.000.000,- pada Tahun 2007. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menunjukkan kinerja ekonomi sebesar 5,00 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni dari Rp. 2.138.052.000.000,- pada Tahun 2006 menjadi Rp. 2.245.000.000.000,- pada Tahun 2007.

Struktur perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow ADHB Tahun 2006 terbentuk dari peranan/kontribusi 9 (sembilan) sektor ekonomi atau lapangan usaha, dimana sembilan sektor tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi sektor, yaitu : (a) sektor primer; (b) sektor sekunder dan (c) sektor tersier. Kontribusi ketiga sektor dimaksud dalam pembentukan nilai PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Kontribusi Sektor / Lapangan Usaha dalam
Pembentukan Nilai PDRB Tahun 2007**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Kontribusi (%)	
		ADHB	ADHK
	Sektor Primer	43,98	46,46
I.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	33,93	35,80
II.	Pertambangan/Penggalian	10,05	10,66
	Sektor Sekunder	15,91	14,97
III.	Industri Pengolahan Non Migas	3,11	2,60
IV.	Listrik, Gas dan Air Bersih.	0,32	0,34
V.	Bangunan.	12,48	12,03
	Sektor Tersier	40,12	38,57
VI.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,23	9,77
VII.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,40	4,57
VIII.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.	4,49	5,46
IX.	Jasa-jasa	22,00	18,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Dari 9 (sembilan) Sektor Ekonomi atau Lapangan Usaha, yang memberikan kontribusi terbesar yaitu :

- Sektor Pertanian, Kehut. Perkeb. dan Perikanan = 35,80 %
- Sektor Jasa = 18,77 %
- Sektor Bangunan = 12,03 %
- Sektor Pertambangan dan Penggalian = 10,66 %

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow tidak terlepas dari kontribusi sektor tersebut di atas, yang dari tahun ke tahun semua sektor ekonomi tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Jika dibandingkan kontribusi setiap sektor selang Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006 terlihat bahwa sektor primer memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, kemudian diikuti

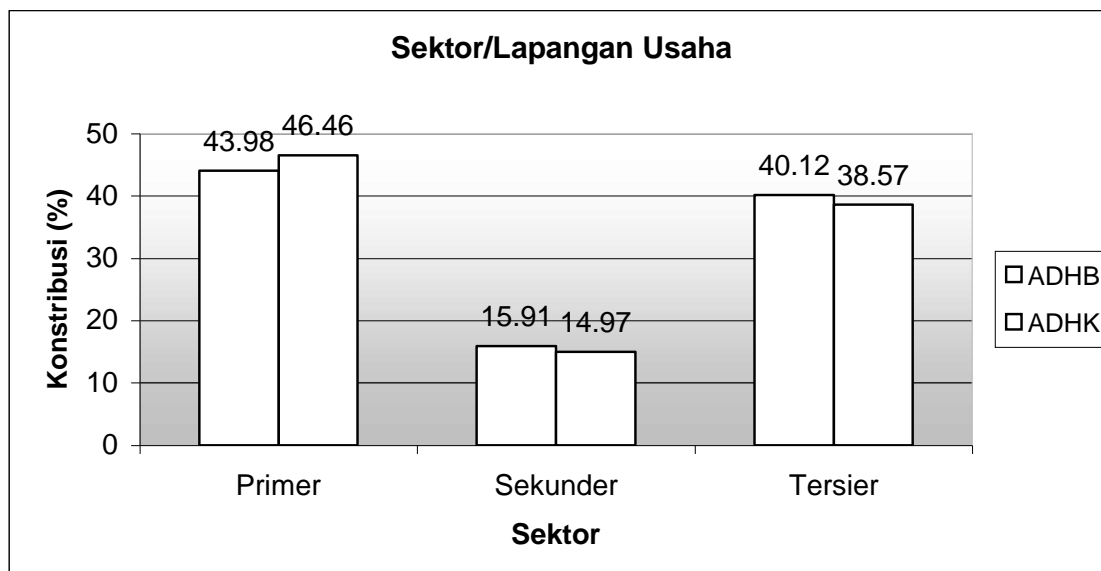
oleh sektor tersier. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor sekunder.

Sektor pertanian ternyata merupakan penyumbang terbesar di dalam pembentukan nilai PDRB dibandingkan dengan delapan sektor lainnya, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih merupakan *prime mover* (roda penggerak utama) perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Semakin besar kontribusi sektor primer menunjukkan bahwa sasaran program pada sektor ini akan semakin efektif dan mengisyaratkan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung berkembang menjadi daerah agraris.

Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mendatangkan investor dibidang pertanian disamping bidang pertambangan dan penggalian yang sudah ada selama ini. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow kurun waktu lima tahun terakhir telah berdampak positif pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah.

Grafik Kontribusi Sektor dalam Pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Selain data pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator dari kemakmuran penduduk adalah nilai dari PDRB perkapitanya. Dengan data tersebut dapat diperoleh gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk sebagai adanya aktivitas produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Mengamati perkembangan beberapa agregat Pendapatan Regional Kab. Bolaang Mongondow pada Tahun 2007, menunjukkan bahwa PDRB Perkapita ADHB mengalami kenaikan dari Rp. 6.330.661,- pada Tahun 2006 menjadi Rp. 7.167.250,- pada Tahun 2007 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13.21 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2003 – 2007**

Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	PDRB Perkapita (rupiah)
2003	2.074.830	4.730.811
2004	2.299.120	4.938.291
2005	2.654.785	5.641.228
2006	3.071.776	6.330.250
2007	3.572.612	7.167.250

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

Sedangkan PDRB perkapita ADHK tumbuh sebesar 9,19 % atau meningkat dari Rp. 4.406.337,- pada Tahun 2006, menjadi Rp. 4.811.281,- pada Tahun 2007. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2003 – 2007**

Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	PDRB Perkapita (rupiah)
2003	1.741.748	3.971.350
2004	1.825.287	3.976.660
2005	2.038.716	4.332.126
2006	2.138.052	4.406.337
2007	2.245.000	4.811.281

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan data di atas, perkembangan beberapa agregat PDRB (ADHB) maupun PDRB (ADHK) serta PDRB perkapita, beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi.

3. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum pemekaran cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2003 sebesar 462.887 jiwa, tahun 2004 sebesar 472.890 jiwa, tahun 2005 sebesar 479.841 jiwa, tahun 2006 sebesar 486.895 jiwa dan tahun 2007 sebesar 494.053 jiwa.

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow selang beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2003 – 2007**

No.	Tahun	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2003	239.608	223.279	462.887	107,31	-
2.	2004	245.576	227.314	472.890	108,03	2,16
3.	2005	249.186	230.655	479.841	108,03	1,47
4.	2006	252.849	234.046	486.895	108,95	1,47
5.	2007	256.566	237.487	494.053		1,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow 2008

Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara tajam sejak tahun 1980. Dari angka 3,96 % pada periode 1971 – 1980, turun menjadi 2,20 % pada periode 1981 – 1991, kemudian menjadi 1,47 % pada periode 1992 – 2001. Penurunan laju pertumbuhan

penduduk ini erat kaitannya dengan keberhasilan Program Keluarga Berencana.

Secara keseluruhan selama tiga dasawarsa terakhir laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami penurunan semenjak tahun 1980, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Program Keluarga Berencana Nasional khususnya ditingkat kecamatan.

Laju pertumbuhan penduduk selang 3 (tiga) dasawarsa terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
1971-1980, 1981-1991, 1992-2001**

Periode	Pertumbuhan
1971 - 1980	3,96
1981 - 1991	2,20
1992 - 2001	1,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Struktur usia penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbagi kedalam kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kelompok umur 0 – 4 tahun dan 5 – 9 tahun mendominasi jumlah penduduk yaitu rata-rata 10,75 %, kemudian disusul kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu 10,23 %.

**Jumlah Penduduk menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%
0 – 4	26.861	25.481	52.342	10,75
5 – 9	26.954	24.888	51.842	10,65
10 – 14	23.173	20.981	44.154	9,07
15 – 19	24.585	22.673	47.258	9,71
20 – 24	24.496	25.299	49.795	10,23
25 – 29	24.679	23.977	48.656	9,99
30 – 34	21.781	20.578	42.359	8,70
35 – 39	18.654	17.396	36.050	7,40
40 – 44	15.773	14.205	29.978	6,16
45 – 49	12.390	10.725	23.115	4,75
50 – 54	9.231	8.174	17.405	3,57
55 – 59	6.317	5.868	12.185	2,50
60 – 64	5.600	5.189	10.789	2,22
65 – 69	7.063	3.543	10.606	2,18
70 – 74	2.856	2.440	5.296	1,09
75 +	2.434	2.631	5.065	1,04
J u m l a h	252.849	234.046	486.895	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Perkembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meningkatkan kemampuannya mengelola sumberdaya alam serta pengembangan hubungan sosial kemasyarakatan dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan masyarakat.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow selang beberapa tahun terakhir relatif meningkat, dengan rincian per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tingkat Pendidikan Usia Sekolah
Di Kabupaten Bolaang Mongondow**

Tahun	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Jumlah Pengajar	Rasio Guru : Siswa
2003	TK	4.331	202	21,44
	SD	62.704	3.311	18,93
	SLTP	14.991	862	17,39
	SLTA / SMU	5.309	436	12,18
	SMK	2.686	109	24,64
2004	TK	4.475	355	12,60
	SD	65.843	3.345	19,68
	SLTP	16.800	1.591	10,56
	SLTA / SMU	5.314	617	8,62
	SMK	2.857	189	15,12
2005	TK	4.667	284	16,43
	SD	62.247	2.962	21,69
	SLTP	17.798	782	22,76
	SLTA / SMU	6.165	321	19,21
	SMK	3.444	128	26,91
2006	TK	5.751	295	19,5
	SD	64.759	3.434	18,9
	SLTP	18.713	1.187	15,8
	SLTA / SMU	6.077	401	15,2
	SMK	3.262	185	17,6
2007	TK			
	SD			
	SLTP			
	SLTA / SMU			
	SMK			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Bolaang Mongondow pada umumnya masih relatif rendah, ini menunjukkan intensitas dan efektivitas proses belajar mengajar di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup tinggi, kondisi ini harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan/sekolah dipelosok wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik melalui jalur pendidikan dan pelatihan reguler secara komprehensif (inspirasi, visi serta rasional) sehingga hakekat pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terjewantahkan.

Dengan logika mengatakan, ada cara lain yang lebih sistematis, praktis, dan ekonomis serta tidak mengorbankan tujuan pendidikan

jangka panjang. Bukan sekedar melalui sensus, tetapi percontohan. Lebih dari itu pembaruan dunia pendidikan akan lestari jika jalan-jalan perbaikan dipandu rasionalitas dan inspirasi tiada henti, bukan sekedar memnuhi kebutuhan kita hari ini. Pendidikan yang bermutu, dampak akhir kedepan adalah terciptanya sumber daya manusia Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbudaya serta berdaya saing tinggi, baik tingkat regional maupun nasional.

Dari keseluruhan penduduk yang bekerja, 65,95 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan yaitu 8,85 %. Pada sektor perdagangan peranan pekerja wanita lebih besar dibanding dengan pekerja laki-laki. Sedangkan sektor lainnya masih didominasi oleh kaum laki-laki ini dapat dilihat dari tabel sebaran penduduk menurut jenis kelamin terhadap lapangan pekerjaan yang utama.

**Penduduk yang Bekerja menurut
Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	104.764	16.932	121.696
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.652	-	2.652
	Industri Pengolahan			
3.	Listrik, Gas dan Air	3.647	1.403	5.050
4.	Konstruksi	-	-	-
5.	Perdagangan besar, eceran,	5.666	204	5.870
6.	rumah makan dan hotel.	6.740	9.596	16.336
	Angkutan, penggudangan, dan			
7.	komunikasi.	8.576	204	8.780
8.	Keuangan dan lainnya	537	358	895
9.	Jasa kemasyarakatan	7.968	7.939	15.907
10	Lainnya	5.304	2.040	7.344
	Jumlah	145.854	38.676	184.530

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007

Selama beberapa tahun kedepan masalah serius yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menekan pertumbuhan jumlah KK miskin tersebut agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memberi dampak sosial terhadap meningkatnya kualitas sumberdaya manusia baik pendidikan maupun kesehatan.

Diproyeksikan jumlah (Kepala Keluarga) KK miskin sampai dengan tahun 2011 dapat ditekan hingga 9,45 %. Demikian pula dengan jumlah pengangguran, pada tahun 2011 diproyeksikan hanya sebesar 11,12 %, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

**Prediksi Jumlah Penduduk, Kemiskinan, Tenaga Kerja,
Angka Partisipasi Sekolah dan Indikator Kesehatan**

INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Penduduk (jiwa)	498.038	507.394	516.925	526.636	536.529
Jumlah KK Miskin	24.349	20.970	18.468	16.473	12.738
% Terhadap Jumlah KK	19,46	16,45	14,22	12,45	9,45
Jumlah Pengangguran (jiwa)	28.755	28.777	28.805	28.868	28.284
% Terhadap Angkatan Kerja	13,12	12,65	12,2	11,78	11,12
APS (%) : SD	96,2	96,8	96,98	97,15	97,35
SLTP	71,7	72,2	72,3	72,8	72,6
SLTA	34,5	34,2	34,32	34,88	34,91
Angka Kematian Bayi (per 1000)	27,2	27	26,4	26,9	26,3
Status Gizi Buruk Balita	23,25	23,11	21,44	20,64	20,39
Umur Harapan Hidup	70	70,1	70,2	70,1	70,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow

3. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah adalah mutlak untuk berperan sebagai instrumen dalam kerangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memacu kegiatan sosial ekonomi masyarakat, membuka kesempatan dan peluang kerja dengan memanfaatkan potensi sehingga secara nyata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah, yang tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan berbagai instrumen kebijakan yang sifatnya produktif serta berpihak pada masyarakat yang direfleksikan kedalam bentuk keputusan atau aturan yang menjadi acuan pelaksanaannya, baik pengguna aturan pada umumnya maupun ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow kurun waktu tahun 2006-2011 dilakukan melalui strategi;

- a. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Intensifikasi penerimaan pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan, dan
- d. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2009.

Kondisi ekonomi Tahun 2009 banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai berikut :

Pertama, kesatuan pendapat dan persepsi tentang implementasi otonomi daerah masih berbeda-beda. Tuntutan dari berbagai kalangan lebih cepat dari proses implementasi otonomi itu sendiri. Sering kurang dipahami bahwa tahun implementasi otonomi baru dimulai tahun 2001, oleh karena itu masih bersifat penyesuaian dan transisi.

Kedua, masih kuatnya pola sentralistik setidaknya tidaknya tercermin dari kewenangan-kewenangan yang masih dilaksanakan oleh beberapa Departemen.

Ketiga, Peraturan perundang-undangan yang terus berubah terkadang tumpang tindih antara pusat dan daerah sehingga proses implementasinya mengalami persepsi yang kabur.

Keempat, alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang tidak pasti dan dan banyak menguras waktu dan energi pemerintah daerah dalam proses kelancaran program pembangunan daerah.

Kelima, persaingan antar daerah yang semakin ketat dampak dari semangat otonomi daerah yang akseleratif.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pertama, stabilitas ekonomi yang terjaga baik akan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Kedua, rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha yang meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan lingkungan internal yang akan berpengaruh negatif adalah sebagai berikut :

Pertama, Terbatasnya kemampuan keuangan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun bantuan Pemerintah Pusat, sementara ruang lingkup permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan besar.

Kedua, masih ada hak-hak dan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan sesuai dengan otonomi daerah sehingga menyulitkan untuk berbuat lebih banyak sementara tuntutan masyarakat semakin tinggi.

Ketiga, terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

Keempat, belum tertatanya manajemen yang berbasis kinerja.

Kelima, belum adanya standar pelayanan minimum.

Keenam, belum tertatanya pengelolaan data dan informasi.

Ketujuh, belum adanya unit pengaduan masalah.

Selain itu masih ada masalah lain yang juga harus mendapat perhatian bersama baik dari unsur pemerintahan, legislatif maupun masyarakat, yaitu :

- a) Belum optimalnya kegiatan organisasi pemerintahan;
- b) Belum optimalnya kinerja keberadaan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan;
- c) Belum memadainya Kemampuan Pembiayaan untuk pembangunan daerah;

C. TANTANGAN POKOK.

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2008 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2009, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan membuka peluang serluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal di daerah yang dibarengi dengan paket regulasi dan debirokratisasi kemudahan investasi sebagai bentuk penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi.

2. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Meskipun pada tahun 2007 persentase pengangguran terhadap angkatan kerja menurun namun hasil prediksi tahun 2008 tidak berbeda jauh sekalipun memperlihatkan trend yang positif. Demikian juga dengan penduduk miskin tidak berbeda jauh dengan

hasil prediksi untuk tahun 2008. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didorong untuk menurunkan tingkat pengangguran yang mulai menurun dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar dengan peningkatan kualitas hidup dalam bentuk penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan baru terutama oleh dunia swasta.

D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO.

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2009, kebijakan ekonomi makro tahun 2009 diarahkan untuk ; *"Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran"*.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan mendorong industri pengolahan; mengurangi hambatan prosedur perijinan; meningkatkan kepastian hukum termasuk peraturan-peraturan daerah yang menghambat. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM; mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan penyediaan sumber-sumber energi terutama energi listrik.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketengakerjaan serta menyusun standar kompetensi dan kompetensi. Perhatian juga pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan).

E. SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2009.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro diatas serta dengan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2009 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin dapat ditekan. Pengangguran diperkirakan turun menjadi 11,12 % persen dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 9,45 % persen pada tahun 2009.

F. PENDANAAN.

Pembiayaan Pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 diarahkan untuk :

- 1) Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasarsasaran pembangunan. Dalam kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat disorong melalui perwujudan kerangka regulasi yang kondusif.
- 2) Pengalokasian pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tidak terserap.

Dengan memperhatikan arah pembiayaan pembangunan tersebut, alokasi pendanaan diutamakan untuk melaksanakan 8 (delapan) prioritas pembangunan seperti diuraikan pada Bab II. Dengan menggunakan pendekatan seperti yang diuraikan diatas, maka tidak setiap prioritas pembangunan akan mendapat alokasi yang setara.

Pertama, karena ada prioritas pembangunan yang lebih mengedepankan kerangka regulasi, dana yang diperlukan relatif kecil

karena satuan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan yang lain. Secara umum satuan biaya yang terkait dengan penyediaan saran dan prasarana akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan yang lain.

Kedua, karena penentuan sasaran/output yang akan berimplikasi pada kenaikan belanja disesuaikan dengan kapasitas untuk mengimplementasikan program-program pembangunan, pendekatan ini sesuai dengan arah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

BAB IV

KAI DAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi mampu dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD/Instansi serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrebang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 adalah merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya.

2. RKPD Tahun 2009 menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2009 sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2009, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2009, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima pemerintah Kabupaten dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2009 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
3. Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Bapeda (Badan Perencanaan Daeah) kabupaten, dengan mendapatkan masukan dari seluruh instansi daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan untuk menjadi dokumen RKPD Tahun Anggaran 2009.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat

berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

5. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap instansi pemerintah wajib melakukan pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 merupakan Rencana Umum Pembangunan Daerah pada berbagai bidang/sector dalam era otonomi yang sarat dengan berbagai perubahan lingkungan strategis sehingga prioritas-prioritas pembangunan disusun dengan mengakomodasi tuntutan yang timbul akibat perubahan tersebut. Selain itu, kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan yang berimplikasi terhadap kemampuan sumber daya keuangan daerah telah diperhitungkan secara cermat dan hati-hati dalam pengalokasian anggaran daerah sehingga upaya pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi daerah dan tuntutan masyarakat dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Agar proses pembangunan yang disusun dapat terlaksana secara terpadu, komprehensif dan tepat sasaran, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan daerah khususnya para kepala SKPD harus senantiasa mengacu pada mekanisme penyusunan perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dokumen perencanaan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini disusun sebagai pedoman semua SKPD untuk membangun daerah dalam rangka Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing, Maju dan Mandiri.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

